



**RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG
KABUPATEN KUBU RAYA**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) ini dapat tersusun. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang daerah, Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Ambawang Tahun 2025 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin.

Sungai Ambawang, Oktober 2024

Camat Sungai Ambawang

JURIN, SE
Penata Tk. I
Nip. 19760909 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I – PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II – HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Sungai Ambawang	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	42
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	60
BAB III – TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	64
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Sungai Ambawang ..	64
3.1.1 Tujuan	64
3.1.2 Sasaran Stategis	64
3.2 Program dan Kegiatan	68
BAB IV – RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	81
BAB V – PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kubu Raya	9
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023	32
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.....	43
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	48
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kubu Raya	60
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya	66
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 Kabupaten Kubu Raya.....	72
Tabel 4.1	Alokasi Anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Thn 2025...	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Sungai Ambawang tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Sungai Ambawang sebagai Perangkat Daerah Tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025. Rencana Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 disusun berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstern;

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 797);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi

- dan Investigasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
 30. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 43);

34. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Kecamatan Sungai Ambawang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan serta dapat dijadikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang untuk jangka waktu satu tahun ke depan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Sungai Ambawang adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan;
- b. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2025 yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Kubu Raya;
- c. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada tahun 2025 kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah;
- d. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu satu tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang 2025 yang selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pemerintah Kecamatan Sungai Ambawang dan Pemerintah Desa se Kecamatan Sungai Ambawang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kinerja Tahun 2025
- 3.3 Program Dan Kegiatan Tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan pencapaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya telah dialokasikan anggaran belanja operation meliputi belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja pegawai non gaji dan tunjangan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.081.843.785,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.813.449.408,00 atau 91,29 %. (per 31 Desember 2023).

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Kubu Raya**

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (2019-2024)	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2023)			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024					
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)				
PERMENDAGRI NO 13															
4	01	11	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4	01	11	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	Bulan	36	12	-	-	-	-	24	75%

4	0 1	1 1	01	00 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang patuh pembayaran pajak	Unit	18	9	-	-	-	-	9	50%
4	0 1	1 1	01	00 7	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Kebutuhan Materai	Lembar	3 org & 1824 Lembar	1 org & 608 Lembar	-	-	-	-	2 Org & 1216 Lembar	75%
4	0 1	1 1	01	00 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan yang terpenuhi	Orang	3 Orang & 36 bulan	1 Orang & 12 bulan	-	-	-	-	2 Orang & 24 bulan	75%
4	0 1	1 1	01	01 0	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan ATK Kantor	Bulan	36 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	24 Bulan	75%
4	0 1	1 1	01	01 1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor	Bulan	36 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	24 Bulan	75%
4	0 1	1 1	01	01 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	Bulan	36 Bulan	12 bulan	-	-	-	-	24 Bulan	75%
4	0 1	1 1	01	01 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Terpenuhi	Exp	1080 exp	360 exp	-	-	-	-	720 Exp	75%
4	0 1	1 1	01	01 7	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Rapat yang terpenuhi kebutuhan makanan dan minumannya	Kali	36 kali	12 Kali	-	-	-	-	24 Kali	75%
4	0 1	1 1	01	01 8	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Keluar daerah	OK	6 OK	2 OK	-	-	-	-	4 OK	75%

4	0	1	01	01	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Kedalam daerah	Kali	288 Kali	96 Kali	-	-	-	-	192 Kali	75%
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpenuhi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	Unit	4 unit	1 Unit	-	-	-	-	1 unit	25%
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	Jenis	9 Jenis		-	-	-	-	6 Jenis	75%
					Pengadaan Mebeleur	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	Jenis	2 Jenis	-	-	-	-	-	1 Jenis	50%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Yang Dipelihara	Unit	-	-	-	-	-	-	5	100%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Jumlah Unit Yang Dipelihara	Unit	24 Unit	24 Unit	-	-	-	-	16 Unit	75%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Unit Yang Dipelihara	Unit	33 Unit	11 Unit AC	-	-	-	-	22 Unit	75%
					Pengelolaan Website	Jumlah Unit Yang Dipelihara	Website	2 Website	1 Website	-	-	-	-	1 Website	50%

					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	2 Orang	2 Orang	-	-	-	-	2 Orang	100%
					Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	0%
					Penyusunan Evaluasi jabatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	0%
					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	3	2	-	-	-	-	2	75%
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	3	2	-	-	-	-	2	75%
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	3	2	-	-	-	-	2	75%
					Penyusunan Renja, Rka, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	12	8	-	-	-	-	8	75%
					penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan LKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	6	4	-	-	-	-	4	75%

					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Jumlah Orang Yang Mengikuti	Orang	3	3	-	-	-	-	3	100%
					Fasilitasi penataan aset pada SKPD	Jumlah Kegiatan Yang terlaksana	Kegiatan	3	2	-	-	-	-	2	75%
					PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					Penyusunan Rencana Straegis (Renstra) SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	100%
					Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	3 dokumen	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	75%
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	2	1	-	-	-	-	1	50%

				Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen yang tersusun	Dokumen	2	1	-	-	-	-	1	50%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
				Penataan Kearsipan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	1	50%
				Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah dokumen yang tersusun	Dokumen	3	2	-	-	-	-	2	75%
				PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	3	2	-	-	-	-	2	75%
				Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan Yang terlaksana	Kegiatan	3	2	-	-	-	-	2	75%
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	2	1	-	-	-	-	1	75%
				Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	2	1	-	-	-	-	1	75%
				PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase Terlaksananya Musyawarah Desa	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
				Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	3	2	-	-	-	-	2	75%

				PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN	Jumlah Titik Hotspot	Titik	18	12	-	-	-	-	12	75%
				Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Desa yang terbina	Desa	18	12	-	-	-	-	12	75%
				PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL UMAT BERAGAMA	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	Kegiatan	1	1	-	-	-	-	1	100%
				Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	1	1	-	-	-	-	1	100%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	%	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%
				Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terbina	Desa	45 Desa	30 desa	-	-	-	-	30 Desa	75%
				Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang terbina	Desa	45 Desa	30 desa	-	-	-	-	30 Desa	75%
				Koordinasi Pelaksanaan pembangunan	Jumlah Desa yang terbina	Desa	45 Desa	30 desa	-	-	-	-	30 Desa	75%
				Pembinaan Ketentraman Ketertiban	Jumlah Desa yang terbina	Desa	45 Desa	30 desa	-	-	-	-	30 Desa	75%
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia	Jenis	9 jenis	6 jenis	-	-	-	-	6 jenis	75%
				Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	75%

				Fasilitasi dan Pembinaan ADD	Jumlah Desa yang terbina	Desa	45 Desa	30 Desa	-	-	-	-	30 Desa	75%
				Fasilitasi peningkatan pelayanan Perizinan	Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia	Jenis	9 Jenis	6 Jenis	-	-	-	-	6 Jenis	75%
				Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	75%
				Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	75%
				Fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	Jumlah Desa yang terbina	Desa	45 Desa	30 Desa	-	-	-	-	30 Desa	75%
				Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	-	-	-	-	2 Kegiatan	75%
PERMENDAGRI NO 90														
7				UNSUR KEWILAYAHAN										
7	0			KECAMATAN										
7	0	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	0	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	0 1	0 1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA)	Dokumen	9	9	-	-	-	-	9	100%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	-	5	5	100%	5	10	100%
7	0 1	0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun (Laporan Kinerja)	Dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100%
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	-	5	5	100%	5	10	100%
7	0 1	0 1	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (LPPD, SIPPD, ANJAB dan EVAJAB) Daerah	Dokumen	8	8	-	-	-	-	8	100%
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	-	3	3	100%	3	6	100%
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

						Keuangan Perangkat Daerah										
7	0 1	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Bulan Pegawai yang menerima gaji	Bulan	26	26	-	-	-	-	26	100%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	33	-	16	16	100%	17	33	100%	
7	0 1	0 1	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24	-	12	12	100%	12	24	100%	
7	0 1	0 1	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100%	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	-	1	1	100%	1	2	100%	
7	0 1	0 1	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100%	

						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	26	-	13	13	100%	13	26	100%
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-	-	1	100%
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	-	-	-	-	1	100%
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	-	-	-	-	1	100%

						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang Dibuat	Stel	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Instalasi Listrik kantor	Bulan	24	24	-	-	-	-	24	100%

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8	-	4	4	100%	4	8	100%
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	Bulan	24	24	-	-	-	-	24	100%
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	-	4	4	100%	4	8	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Bahan Cetak dan Penggandaan	Bulan	24	24	-	-	-	-	24	100%
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	-	4	4	100%	4	8	100%
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	24	24	-	-	-	-	24	100%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	-	-	-	-	-	0	0%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Kali	426	426	-	-	-	-	426	100%

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	492	-	247	247	100%	245	492	100%
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	11	3	7	7	100%	1	11	100%
7	0 1	0 1	2.0 7	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit yang terpenuhi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	-	1	1	100%	0	1	100%
7	0 1	0 1	2.0 7	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang terpenuhi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0 1	0 1	2.0 7	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	Unit	3	3	-	-	-	-	3	100%
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	-	6	6	100%	1	7	100%
7	0 1	0 1	2.0 7	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	8	4	2	2	100%	2	8	100%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	24	24	-	-	-	-	24	100%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	16	-	12	12	100%	4	16	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	24	-	-	-	-	24	100%
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	-	12	12	100%	12	24	100%
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	103	34	42	42	100%	34	77	75%

7	0	0	2.0	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya	Unit	18	18	-	-	-	-	18	100%
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	-	9	9	100%	10	19	95%
7	0	0	2.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang dipelihara	Unit	16	16	-	-	-	-	16	100%
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48	-	33	33	100%	24	24	50%
7	0	0	2.0	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	2	-	-	-	-	-	-	-
7	0	0	2.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-

7	012				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	012	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	012	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Dokumen	2	2	-	-	-	-	2	100%
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	3	-	1	1	100%	2	3	100%
7	012	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	012	2.04	01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan	Surat	48	48	-	-	-	-	48	100%

						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	35	-	1	1	100%	25	26	74%
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan	Surat	36	36	-	-	-	-	36	100%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	37	-	1	1	100%	27	28	76%
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	-	-	-	-	3	100%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kegiatan	8	4	2	2	100%	2	8	100%
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	-	-	-	-	2	100%

						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga /Masyarakat	30	-	15	15	100%	15	30	100%
7	013	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	-	-	-	-	2	100%
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	014				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	014		2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	60	30	15	15	100%	15	60	100%
7	014		2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	Kali	30	30	-	-	-	-	30	100%

					Negara Republik Indonesia										
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	204	-	88	88	100%	58	146	72%
7	015				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	015	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kegiatan	4	2	1	1	100%	1	4	100%

7	0 1	0 5	2.0 1	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan yang terlaksana	Kegiatan	2	2	-	-	-	-	2	100%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	440	-	220	220	100%	189	409	93%

7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	60	30	15	15	100%	15	60	100%
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Desa	30	30	-	-	-	-	12	40%
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Desa	30	30	-	-	-	-	30	100%
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Desa	30	30	-	-	-	-	30	100%

						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	0 1	0 6	2.0 1	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Desa	30	30	-	-	-	-	30	100%
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	-	1	1	100%	1	2	100%
7	0 1	0 6	2.0 1	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	Desa	30	30	-	-	-	-	30	100%
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	197	-	103	103	100%	78	181	92%

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2024.

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

Kode					Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7					UNSUR KEWILAYAHAN			3.081.843.785	2.811.249.408	91,22
7	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.081.843.785	2.811.249.408	91,22
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2.457.485.894	2.190.834.049	89,15
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	34.259.680	32.100.905	93,70
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	20.713.780	18.555.005	89,58
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	6.276.360	6.276.360	100,00
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.269.540	7.269.540	100,00
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.003.697.537	1.760.289.989	87,85
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	17 Orang/Bl n	17 Orang/Bl n	1.977.201.177	1.733.793.629	87,69
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000	19.800.000	100,00
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan	1 Laporan	1 Laporan	5.703.180	5.703.180	100,00

					Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
7	0 1	0 1	2. 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13 Laporan	13 Laporan	993.180	993.180	100,00
7	0 1	0 1	2. 03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	14.581.000	13.722.225	94,11
7	0 1	0 1	2. 03	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.423.000	9.564.225	91,76
7	0 1	0 1	2. 03	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.376.000	2.376.000	100,00
7	0 1	0 1	2. 03	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.782.000	1.782.000	100,00
7	0 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	263.713.022	261.567.244	99,19
7	0 1	0 1	2. 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	5.965.600	5.965.600	100,00
7	0 1	0 1	2. 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket	101.536.822	101.531.044	99,99
7	0 1	0 1	2. 06	0 5	penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	12.273.600	12.273.600	100,00
7	0 1	0 1	2. 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan	360 Dokumen	360 Dokumen	660.000	660.000	100,00
7	0 1	0 1	2. 06	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221 Laporan	221 Laporan	143.277.000	141.137.000	98,51
7	0 1	0 1	2. 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	7 Unit	94.585.699	94.585.699	100,00
7	0 1	0 1	2. 07	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	39.000.000	39.000.000	100,00

7	0 1	0 1	2. 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	6 Unit	55.585.699	55.585.699	100,00
7	0 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			117.398.197	99.587.686	84,83
7	0 1	0 1	2. 08	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	2 Laporan	2 Laporan	43.104.000	34.845.213	80,84
7	0 1	0 1	2. 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	74.294.197	64.742.473	87,14
7	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 Unit	42 Unit	23.836.458	23.566.000	98,87
7	0 1	0 1	2. 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	9 Unit	1.306.458	1.036.000	79,30
7	0 1	0 1	2. 09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	33 Unit	33 Unit	22.530.000	22.530.000	100,00
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	66.510.430	65.760.430	98,87
7	0 1	0 2	2. 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	100%	6.199.770	5.449.770	87,90
7	0 1	0 2	2. 02	0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	6.199.770	5.449.770	87,90
7	0 1	0 2	2. 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	60.310.660	60.310.660	100,00

7	01204	01	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	25 Dokumen	25 Dokumen	2.100.000	2.100.000	100,00
7	01204	02	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	27 Laporan	27 Laporan	2.100.000	2.100.000	100,00
7	01204	03	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	1 Laporan	56.110.660	56.110.660	100,00
7	013			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	141.590.800	141.440.800	99,89
7	01301			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	141.590.800	141.440.800	99,89
7	01301	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15 Lembaga Kemasyar akatan	15 Lembaga Kemasyar akatan	17.040.000	17.040.000	100,00
7	01301	03	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	124.550.800	124.400.800	99,88
7	014			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	100%	54.454.349	52.854.925	97,06
7	01402			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15 Desa	15 Desa	54.454.349	52.854.925	97,06
7	01402	01	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-	70 Laporan	70 Laporan	54.454.349	52.854.925	97,06

					Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	100%	14.108.160	14.108.160	100,00
7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15 Desa	15 Desa	14.108.160	14.108.160	100,00
7	0	0	2.	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	220 Orang	220 Orang	14.108.160	14.108.160	100,00
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	253.108.453	251.665.345	99,43
7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15 Desa	15 Desa	253.108.453	251.665.345	99,43
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	86 Dokumen	86 Dokumen	109.662.297	108.748.987	99,17
7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	100,00

7	0	0	2.	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	83 Dokumen	83 Dokumen	62.698.078	62.698.078	100,00
7	0	0	2.	1	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	6.000.000	100,00
7	0	0	2.	1	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	88 Laporan	88 Laporan	68.748.078	68.218.280	99,23
					TOTAL			3.081.843.785	2.811.249.408	91,22

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran tahun 2023 pada Kecamatan Sungai Ambawang sebesar Rp. 2.811.249.408,- dari anggaran yang ada sebesar Rp. 3.081.843.785,- atau sebesar 91,22%. Realisasi ini mengalami penurunan dari tahun 2022. Dimana realisasi anggaran pada tahun 2022 sebesar 97,64%.

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang mempunyai target 5 Dokumen dengan anggaran Rp. 20.713.780,- dapat direalisasikan 5 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 18.555.005,- (89,58%);
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang mempunyai target 5 Laporan dengan anggaran Rp. 6.276.360,- dapat direalisasikan 5 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 6.276.360,- (100 %);
3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mempunyai target 2 Laporan dengan anggaran Rp. 7.269.540,- dapat direalisasikan 2 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 7.269.540,- (100%).

Pada Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN yang mempunyai target 17 Orang/ Bulan dengan anggaran Rp. 1.977.201.177,- dapat

- direalisasikan 17 Orang/ Bulan dengan realisasi anggaran Rp. 1.733.793.629,- (87,69%);
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD yang mempunyai target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 19.800.000,- dapat direalisasikan 1 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 19.800.000,- (100%);
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang mempunyai target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 5.703.180,- dapat direalisasikan 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 5.703.180,- (100%);
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang mempunyai target 13 Laporan dengan anggaran Rp. 993.180,- dapat direalisasikan 13 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 993.180,- (100%).

Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang mempunyai target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 10.423.000,- dapat direalisasikan 1 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 9.564.225,- (91,76%);
2. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang mempunyai target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 2.376.000,- dapat direalisasikan 1 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 2.376.000,- (100%);
3. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang mempunyai target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 1.782.000,- dapat direalisasikan 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 1.782.000,- (100%).

Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang mempunyai target 1 Paket dengan anggaran Rp. 5.965.600,- dapat direalisasikan 1 Paket dengan realisasi anggaran Rp. 5.965.600,- (100%);
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang mempunyai target 3 Paket dengan anggaran Rp. 101.536.822,- dapat direalisasikan 12 Paket dengan realisasi anggaran Rp. 101.531.044,- (99,99%);
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan yang mempunyai target 1 Paket dengan anggaran Rp.12.273.600 ,- dapat

direalisasikan 1 Paket dengan realisasi anggaran Rp. 12.273.600,- (100%);

4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai target 360 Dokumen dengan anggaran Rp. 660.000,- dapat direalisasikan 360 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 660.000,- (100%);
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang mempunyai target 221 Laporan dengan anggaran Rp. 143.277.000,- dapat direalisasikan 221 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 141.137.000,- (98,51%).

Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mempunyai target 1 Unit dengan anggaran Rp. 39.000.000,- dapat direalisasikan 1 unit dengan realisasi anggaran Rp. 39.000.000,- (100%);
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya yang mempunyai target 6 Unit dengan anggaran Rp. 55.585.699,- dapat direalisasikan 6 Unit dengan realisasi anggaran Rp. 55.585.699,- (100%).

Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik yang mempunyai target 2 Laporan dengan anggaran Rp. 43.104.000,- dapat direalisasikan 2 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 34.845.213,- (80,84%);
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang mempunyai target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 74.294.197,- dapat direalisasikan 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 64.742.473,- (87,14%).

Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mempunyai target 9 Unit dengan anggaran Rp. 1.306.458,- dapat direalisasikan 9 Unit dengan realisasi anggaran Rp. 1.036.000,- (79,30%).
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya yang mempunyai target 33 Unit dengan anggaran Rp. 22.530.000,- dapat direalisasikan 33 Unit dengan realisasi anggaran Rp. 22.530.000,- (100%).

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mempunyai target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 6.199.770,- dapat direalisasikan 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 5.449.770,- (87,90%).

Pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yang mempunyai target 25 Dokumen dengan anggaran Rp. 2.100.000,- dapat direalisasikan 25 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 2.100.000,- (100%);
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan yang mempunyai target 27 Laporan dengan anggaran Rp. 2.100.000,- dapat direalisasikan 27 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 2.100.000,- (100%);
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang mempunyai target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 56.110.660,- dapat direalisasikan 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 56.110.660,- (100%).

Pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang mempunyai target 15 Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 17.040.000,- dapat direalisasikan 15 Lembaga Kemasyarakatan dengan realisasi anggaran Rp. 17.040.000,- (100%);
2. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang mempunyai target 1 Laporan dengan anggaran Rp. 124.550.800,- dapat direalisasikan 1 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 124.400.800,- (99,88%).

Pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai target

70 Laporan dengan anggaran Rp. 54.454.349,- dapat direalisasikan 70 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 52.854.925,- (97,06%)

Pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai target 220 Orang dengan anggaran Rp. 14.108.160,- dapat direalisasikan 220 Orang dengan realisasi anggaran Rp. 14.108.160,- (100%).

Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang mempunyai target 86 Dokumen dengan anggaran Rp. 109.662.297,- dapat direalisasikan 86 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 108.748.987,- (99,17%);
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang mempunyai target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 6.000.000,- dapat direalisasikan 1 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 6.000.000,- (100%);
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan yang mempunyai target 83 Dokumen dengan anggaran Rp. 62.698.078,- dapat direalisasikan 83 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 62.698.078,- (100%);
4. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang mempunyai target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 6.000.000,- dapat direalisasikan 1 Dokumen dengan realisasi anggaran Rp. 6.000.000,- (100%);
5. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang mempunyai target 88 Laporan dengan anggaran Rp. 68.748.078,- dapat direalisasikan 88 Laporan dengan realisasi anggaran Rp. 68.218.280,- (99,23%).

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Perubahan Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2019-2024, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kedudukan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah di bidang Pemerintahan Daerah telah di atur di dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 dan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81,37/A	81,54/A	81,45/A	82/A	N/A	-	81,45/A	82/A	
2	Nilai IKM	-	-	-	-	93,70 /A	94 /A	-	-	93,70 /A	94 /A	
3	Jumlah Desa Mandiri	-	-	13 Desa	14 Desa	15 Desa	15 Desa	13 Desa	-	15 Desa	15 Desa	

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Ambawang di Renstra tahun 2019-2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Sungai Ambawang berdasarkan hasil pengukurannya Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Ambawang pada Renstra 5 (Tahun) sebelumnya Tahun 2019-2024 dapat dijabarkan dalam Tabel 2.3.

Dari 3 (tiga) indikator yang ada pada Tabel 2.3 secara keseluruhan indikator sasaran mencapai :

1. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan dengan rasio capaian hampir mencapai 100%.
2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kubu Raya dengan rasio capaian rata-rata Diatas 85%.
3. Persentase Jumlah Desa Mandiri pada Kecamatan Sungai Ambawang dengan rasio capaian mencapai diatas 100%. Bahkan pada tahun 2020 persentase capaian kinerjanya mencapai 250% Dimana target desa mandiri yang direncanakan sebanyak 2 desa tetapi pada realisasinya mencapai 5 desa.

Disamping Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas, maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Sungai Ambawang antara lain :

❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada aparatur Kecamatan dan desa untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari –hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur Kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan, dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi Kecamatan dan desa.
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di desa.
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan desa.

❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan :

1. Melakukan Monitoring pelaksanaan Musrenbang desa dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.

2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan “PATEN” merupakan suatu system pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- ❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban :
 - a. Melakukan penataan dan penertiban PKL dibantu beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol-PP).
 - b. Pembinaan anggota Linmas se-Desa di Kecamatan Sungai Ambawang.
 - ❖ Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Rakyat :
 - a. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan Sosial di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang.
 - b. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
 - c. Pelayanan administrasi yang terkait kesejahteraan Masyarakat seperti surat ahli waris maupun surat rekomendasi pernikahan.

Jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Sungai Ambawang adalah pelayanan langsung kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Pelaporan data dan kondisi kependudukan, pelayanan dan hal-hal yang sesuai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan.
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani Izin.
3. Pembuatan Surat Pernyataan Waris dan Kuasa Waris.
4. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi kebersihan lingkungan, bantuan korban bencana, kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat di wilayah Kecamatan.
5. Penjaringan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan kepada masyarakat yang membutuhkan serta kepada instansi yang terkait.
8. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum ditingkat Kecamatan.

2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat Kinerja pelayanan perangkat daerah Kecamatan Sungai Ambawang dalam hal kritis adalah meningkatnya profesionalisme petugas dan sistem pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Sungai Ambawang:
 - a. Terbatasnya jumlah personal di Kecamatan Sungai Ambawang sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD Kecamatan Sungai Ambawang.
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing-masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Kubu Raya.
 - d. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah
Tantangan:
 - a. Jaringan Internet sering bermasalah sehingga menghambat proses kerja.
 - b. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan.
 - c. Keterbatasnya sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik.**Peluang:**
 - a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada.
 - b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya.
 - c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
Pada tahun 2024 akan diadakan kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah.

- b. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik
Pada tahun 2024 diadakan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik efektif dan cepat bagi masyarakat.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan sosialisasi penangan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan agar terciptanya keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan.
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Pada tahun 2024 dilaksanakannya kegiatan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, UUD 1945 dan pelestarian Bhineka Tunggal Ika.
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Pada tahun 2024 dilaksankan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa, Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Adet Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan, Fasilitasi penataan, Pemanfatan Ruang desa serta penegasan batas desa, dan Koordinasi Plaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan diwilayah Kecamatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Prosedur Bottom Up).
3. Penyelesaian Temuan-temuan setelah proses tersebut untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak diprioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.
4. Untuk rewiuw terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Sungai Ambawang lebih jelas dapat di lihat tabel 2.3

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Cata tan Pent ing		
					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerj a	Kebutuhan Dana
Indikator	Satuan	Indikator	Satuan														
(1)																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
7	0				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Sunga i Amba wang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	72/B B	3.089.111. 000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Sunga i Amba wang	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	72/BB	3.089.111 .000	
7	0	0	2.		Perencanaan,Pe nganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sunga i Amba wang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	14	48.500.00 0	Perencanaan,Pe nganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sunga i Amba wang	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Doku men	14	48.500.00 0	
7	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sunga i Amba wang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	12.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Sunga i Amba wang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	3	12.000.00 0	

7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.000.000
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000.000
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	5	8.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	5	8.000.000

							Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
7	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	6.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	6.500.000			
7	0	0	2.		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	35	2.230.700.000	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	35	2.230.700.000			
7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	17	2.200.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	17	2.200.000.000			
7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	22.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	22.000.000			

7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	6.500.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	13	2.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	13	2.200.000
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	20.000.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	7	20.000.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000

7	0	0	2.	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	5.000.000	
7	0	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	5.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	5.000.000	
7	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000	
7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi	Orang	17	67.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi	Orang	17	67.500.000	
7	0	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	17	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	17	20.000.000	
7	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	47.500.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5	47.500.000	
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	225.837.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	225.837.000	
7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.400.000	

7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	62.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	62.000.000	
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	12.500.000	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	12.500.000	
7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	365	660.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	365	660.000	
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	143.277.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	143.277.000	
7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	235.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	10	235.000.000	
7	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	30.000.000	
7	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	35.000.000	Pengadaan Mebel	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	35.000.000	
7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	70.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	70.000.000	

7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	100.000.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	164.824.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	164.824.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	44.304.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	44.304.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	120.520.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36	120.520.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	45	96.750.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	45	96.750.000	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	1.750.000	

7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	25.000.000	
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	1	5.000.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	65.000.000	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	65.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sungai Ambawang	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	Point	92,39 /A	62.610.660	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sungai Ambawang	Nilai Indeks Kepuasan masyarakat	Point	92,39 /A	62.610.660	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	6.500.000	Penyelenggaraan n Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	2	6.500.000	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	6.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	6.500.000	

7	0	0	2.	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	2	56.110.660	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	2	56.110.660	
7	0	0	2.	04	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	56.110.660	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	56.110.660	
7	0	0	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sungai Ambawang	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100	82.500.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sungai Ambawang	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase	100	82.500.000	
7	0	0	2.	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	82.500.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	2	82.500.000	
7	0	0	2.	01	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	15	17.500.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	15	17.500.000	
7	0	0	2.	01	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	65.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	65.000.000	
7	0	0	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sungai Ambawang	Persentase Pelaksanaan Program penyelenggaraan Urusan	Persentase	100	57.600.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sungai Ambawang	Persentase Pelaksanaan Program penyelenggaraan Urusan	Persentase	100	57.600.000	

7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sungai Ambawang	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	100	231.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sungai Ambawang	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Perse ntase	100	231.000.000	
7	0	0	2.		Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	15	231.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	15	231.000.000	
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15	62.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Doku men	15	62.000.000	
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Doku men	15	10.000.000	
7	1	6	2	00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	15	5.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Doku men	15	5.000.000	
7	1	6	2	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	15	35.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Doku men	15	35.000.000	
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Dokumen	15	54.500.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan	Doku men	15	54.500.000	

							Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				
7	0	0	2.	00	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	6.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	2	6.000.000	
7	0	0	2.	00	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	103	58.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Sungai Ambawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	103	58.500.000	
										3.522.821.660							3.522.821.660

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dilakukan sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pelaksanaannya dimulai dengan membuat Rancangan awal RKPD. Pelaksanaan selanjutnya dilakukan dengan melakukan musrenbang desa guna menampung aspirasi langsung dari masyarakat. Hasil dari musrenbang tingkat desa ini nantinya akan dilanjutkan dengan musrenbang tingkat kecamatan untuk dilakukan perangkingan berdasarkan usulan prioritas. Tahapan ini dimaksudkan guna mengkoordinasikan penyusunan rancangan SKPD, Renja SKPD dan usulan dari masyarakat. Selanjutnya akan dilakukan musrenbang penyusunan RKPD. Hasil ini nantinya akan dijadikan sebagai Rancangan akhir RKP. Kecamatan Sungai Ambawang melakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung yang ditransformasikan menjadi program dan kegiatan yang ada di SKPD. Usulan program dan kegiatan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kubu Raya

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Pelaksana)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Desa Teluk Bakung Dusun Lintang Batang RT.005/RW 002 Sungai Ambawang	Jumlah Bangunan SD	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(RT 001/RW 002 Dusun Banyuates, 1,00 Sungai Ambawang)	Jumlah Bangunan PAUD	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Karya III Sungai Ambawang	Jumlah Bantuan ke Lembaga	1 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Puguk	Jumlah Bantuan ke Lembaga	1 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(Polindes Parit Galunggung RT 014 RW 015 Dusun Lingga Selatan, Sungai Ambawang)	Jumlah Bangunan yang rusak	1 Unit	Dinas Kesehatan
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	(Pembangunan PUSTU Desa Durian,Sungai Ambawang)	Jumlah Bangunan yang rusak	1 Unit	Dinas Kesehatan
7	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(dusun teluk lais,lintang batang dan dusun bawas lestari, Sungai Ambawang)	Normalisasi Sungai	4 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

8	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	(Parit Dayak RT 001 RW 004 Dusun Maja Raya, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang)	Saluran Dtrainase yg Blm tersedia	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pagar sekolah SMPN 4 Sui Ambawang rusak parah Desa Pancaroba Dusun Sangku Rt.001/Rw.02, Sungai Ambawang)	Sarana dan prasarana di luar bangunan gedung yang rusak/belum tersedia	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Sungai Tempayan Desa Mega Timur, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang)	Jalan poros kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	(Jalan poros desa durian, Sungai Ambawang)	Jalan poros kabupaten dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Jembatan Dusun Rasau Rt. 002/Rw. 004, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	10 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Prt. Jelawat RT.002 RW.004, Dusun Maja Raya, Bengkarek, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Dusun Arjuna RT 026/RW 019 , Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jalan lingkungan Gg. Budaya RT.001 RW.001 Dusun 1 Ambawang Kuala, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Jalan lingkungan Dusun Karya III Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jalan Poros Desa Pancaroba (Dusun Pancaroba, Dusun Sangku, Dusun Sairi, Dusun Tapah, Dusun Panca Maju, Dusun Cangko Manis), Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	20000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(jalan poros desa puguk, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	1000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Jl. Poros Dusun Sungai Jawa RT 004 RW 001 Desa Korek, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	500 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Jalan RT 002/RW 004 DUSUN MAJU SEJAHTERA, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	1000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Jalan RT 001 RW 004, Dusun Belidak, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

22	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	(Gg. Anom Aliami RT.001 RW.006 Dusun Anom, Sungai Ambawang)	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	200 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Mega Timur, Sungai Ambawang	Jumlah Hibah Utk BKMT	1 Kelompok	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	(Desa Pancaroba Tersebar di 6 Dusun : Dusun Pancaroba, Dusun Sangku, Dusun Sairi, Dusun Tapah, Dusun Cangko Manis, Dusun Sairi)	Jumlah Unit	6 Unit	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
25	Pembangunan Prasarana Pertanian	DUSUN MAJU JAYA DESA PASAK, Sungai Ambawang)	DAM parit yang rusak atau belum tersedia	1 Unit	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
26	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dusun Beringin RT 001 RW 004, Kab. Kubu Raya	Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan	100 Liter	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
27	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Korek, Sungai Ambawang	Jumlah Lembaga Koperasi	1 Lembaga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
28	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa Korek, Sungai Ambawang	Jumlah Lembaga Koperasi	1 Lembaga	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
29	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dusun Pelaik Rt, 003/Rw,003 , Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang	Jumlah alat sarana dan prasarana olahraga	1 Lembaga	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
30	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	RT 002 RW 001 DUSUN MAJU BERSAMA PASAK, Sungai Ambawang)	Jumlah Lembaga	1 Lembaga	Dinas Perikanan
31	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Desa Sungai Ambawang Kuala, Sungai Ambawang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	10 Unit	Dinas Perikanan
32	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Desa Ampera Raya, Sungai Ambawang	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan	1000 Unit	Dinas Perikanan
33		Dusun Sungai Piang, Dusun Banyuates, Dusun Kalimantan dan Dusun Belidak, Desa Pasak Piang, Sungai Ambawang)	Jumlah Bibit Ternak	60 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
34	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jl Terminal Dusun Maja Raya RT 001 RW 004, Kab. Kubu Raya, Sungai Ambawang	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman belum memadai (bantuan bibit tanaman perkebunan)	10 Lembaga	Dinas Perkebunan dan Peternakan
35	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman belum memadai (bantuan bibit tanaman perkebunan)	10 Lembaga	Dinas Perkebunan dan Peternakan
36	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang	Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	100 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
37	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dusun Kampung Baru II Rt.002 Rw.005 Sungai Ambawang	Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	10 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan

38	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang	Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	1000 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
39	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	10 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
40	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dusun Sungai Jawa, Rt.002 Rw.001 Desa Korek Sungai Ambawang	Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	10 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
41	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dusun Sungai Jawa, Rt.002 Rw.001 Desa Korek Sungai Ambawang	Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	10 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
42	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dusun Lintang Batang, Sungai Ambawang	Peredaran Benih/Bibit Ternak belum memadai	100 Ekor'	Dinas Perkebunan dan Peternakan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan

Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan antara lain :

1. Merupakan jawaban atas permasalahan dalam kajian lingkungan internal/ eksternal;
2. Tujuan tidak akan mengalami perubahan yang bermakna kecuali perubahan yang sangat signifikan;
3. Menjawab kesenjangan antara tingkat pelayanan saat ini dan akan datang;
4. Menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai organisasi;
5. Menunjukkan secara jelas arah lembaga dan program-programnya namun tidak spesifik;
6. Harus menantang tapi realistis dan dapat dicapai.

3.2.2 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu (tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;

- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Tabel 3.1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PERIODE RENSTRA 2025
KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG

Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Satuan		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun	
										2025	2026
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(7)	(8)	
T.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	IT.1	Nilai SAKIP					Point	63,3 / B	63,89 / B	
				S.1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	IS.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	72 / BB	73 / BB	
T.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IT.2	Indeks Kepuasan Masyarakat					Point	87,74 / Sangat Baik	88,45 / Sangat Baik	
				S.2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	IS.2	Nilai IKM	Point	92,39 / Sangat Baik	93 / Sangat Baik	

				S.3	Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa	IS.3	Jumlah Desa Mandiri	Desa	15	15
--	--	--	--	-----	--	------	------------------------	------	----	----

3.2 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun program dan kegiatan pokok yang telah dan akan dilaksanakan diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan dalam Renja Kantor Kecamatan Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang sudah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD

- C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 - d. Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

- e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- f. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- g. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayah Kecamatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dapat dilakukan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam uraian kegiatan tersebut perlu ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan dari SKPD yang bersangkutan.

Kriteria indikator kinerja kegiatan tersebut harus dapat menggambarkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini:

- Spesifik dan jelas, sehingga tidak memungkinkan terjadinya kesalahan interpretasi;
- Dapat diukur secara obyektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;
- Relevan, yaitu indikator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan dengan TUPOKSI, tujuan serta manfaat dan dampak;
- Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran dan hasil serta manfaat dan dampak;
- Cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian dengan pelaksanaan kegiatan;
- Efektif, data/informasi yang terkait dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat diperoleh, dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan sumber daya yang tersedia;
- Dievaluasi secara terus menerus setiap tahun untuk dapat memenuhi tuntutan stakeholders dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kubu Raya

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Indikator	Satuan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)		(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	0				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	Kec. Sungai Ambawang	72/BB	3.089.111.000	APBD		73/BB	3.190.716.000
7	0	0	2.0		Perencanaan, Pengang- garan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	14	48.500.000	APBD		13	50.500.000
p 7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	3	12.000.000	APBD		2	8.000.000
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	1	6.000.000	APBD		1	7.000.000

7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	1	5.000.000	APBD		1	6.000.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	1	6.000.000	APBD		1	7.000.000
7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	1	5.000.000	APBD		1	6.000.000
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	5	8.000.000	APBD		5	9.000.000
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	2	6.500.000	APBD		2	7.500.000
7	01	01	2.02		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	35	2.230.700.000	APBD		35	2.432.200.000
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	Kec. Sungai Ambawang	17	2.200.000.000	APBD		17	2.400.000.000
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	4	22.000.000	APBD		4	23.000.000

7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	1	6.500.000	APBD		1	7.000.000
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	13	2.200.000	APBD		13	2.200.000
7	01	01	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	7	20.000.000	APBD		7	24.000.000
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	1	5.000.000	APBD		1	6.000.000
7	01	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	1	5.000.000	APBD		1	6.000.000
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	4	5.000.000	APBD		4	6.000.000

7	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	1	5.000.000	APBD		1	6.000.000
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terfasilitasi	Orang	Kec. Sungai Ambawang	17	67.500.000	APBD		15	50.000.000
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Kec. Sungai Ambawang	17	20.000.000	APBD		0	-
7	0	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kec. Sungai Ambawang	5	47.500.000	APBD		5	50.000.000
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	Kec. Sungai Ambawang	12	225.837.000	APBD		24	234.112.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Kec. Sungai Ambawang	4	7.400.000	APBD		4	7.850.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kec. Sungai Ambawang	8	62.000.000	APBD		8	66.000.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kec. Sungai Ambawang	4	12.500.000	APBD		4	13.500.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	365	660.000			360	660.000
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	250	143.277.000	APBD		253	146.102.000

7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	Kec. Sungai Ambawang	10	235.000.000	APBD		7	160.000.000
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kec. Sungai Ambawang	1	30.000.000	APBD		-	-
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kec. Sungai Ambawang	3	35.000.000	APBD		3	30.000.000
7	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kec. Sungai Ambawang	5	70.000.000	APBD		4	65.000.000
7	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	Kec. Sungai Ambawang	1	100.000.000	APBD		1	65.000.000
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	36	164.824.000	APBD		36	167.804.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	24	44.304.000	APBD		24	44.304.000
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	36	120.520.000	APBD		36	123.500.000
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Unit	Kec. Sungai Ambawang	45	96.750.000	APBD		48	72.100.000

7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Kec. Sungai Ambawang	10	1.750.000	APBD		11	2.100.000
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kec. Sungai Ambawang	35	25.000.000	APBD		35	25.000.000
7	01	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Unit	Kec. Sungai Ambawang	1	5.000.000	APBD		1	5.000.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	Kec. Sungai Ambawang	1	65.000.000	APBD		1	40.000.000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	Kec. Sungai Ambawang	92,39/A	62.610.660	APBD		93 / Sangat Baik	64.900.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	2	6.500.000	APBD		2	6.500.000
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	2	6.500.000	APBD		2	6.500.000
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan	Kec. Sungai Ambawang	2	56.110.660	APBD		2	58.400.000
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	2	56.110.660	APBD		1	58.400.000

7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persenta se	Kec. Sungai Ambawa ng	100	82.500.000	APBD		100	85.000.000
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang Dilaksanakan	Kegiatan	Kec. Sungai Ambawa ng	2	82.500.000	APBD		2	85.000.000
7	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	Kec. Sungai Ambawang	15	17.500.000	APBD		15	18.500.000
7	0 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	1	65.000.000	APBD		1	66.500.000
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persenta se	Kec. Sungai Ambawa ng	100	57.600.000	APBD		100	59.600.000
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Kegiatan	Kec. Sungai Ambawa ng	2	57.600.000	APBD		2	59.600.000

7	0 1	0 5	2.0 1	000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	Kec. Sungai Ambawang	300	24.000.000	APBD		350	26.000.000
7	1	5	2,0 1	000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	4	33.600.000	APBD		4	33.600.000
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase	Kec. Sungai Ambawang	100	231.000.000	APBD		100	247.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Dibina	Desa	Kec. Sungai Ambawang	15	231.000.000	APBD		15	247.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1	000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	15	62.000.000	APBD		15	65.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	15	10.000.000	APBD		15	12.500.000
7	1	6	2,0 1	000 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	15	5.000.000	APBD		15	6.500.000

					dengan Pembangunan Desa									
7	1	6	2,0 1	011	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	15	35.000.000	APBD		15	40.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1	001 2	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	15	54.500.000	APBD		15	56.500.000
7	0 1	0 6	2.0 1	001 5	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	Kec. Sungai Ambawang	2	6.000.000	APBD		2	6.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1	001 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kec. Sungai Ambawang	103	58.500.000	APBD		107	60.500.000
										3.522.821.660				3.647.216.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 berisi Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sungai Ambawang. Jumlah seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025 adalah sebanyak 5 Program, 13 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Total kebutuhan dana untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.522.821.660,-

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 Kecamatan Sungai Ambawang sebagai berikut:

Tabel 4.1
Alokasi Anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Tahun 2025
Kabupaten Kubu Raya

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
(1)					(2)	(3)
P					UNSUR KEWILAYAHAN	
7	0				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 3.089.111.000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 48.500.000
7	01	01	2.01	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 12.000.000
7	01	01	2.01	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.000.000
7	01	01	2.01	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 5.000.000
7	01	01	2.01	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp 6.000.000
7	01	01	2.01	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 5.000.000
7	01	01	2.01	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp 8.000.000

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	01	01	2.01	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 6.500.000
7	0 1	0 1	2.0 2		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.230.700.000
7	01	01	2.02	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Rp 2.200.000.000
7	01	01	2.02	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 22.000.000
7	01	01	2.02	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.500.000
7	01	01	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 2.200.000
7	0 1	0 1	2.0 3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 20.000.000
7	01	01	2.03	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 5.000.000
7	01	01	2.03	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 5.000.000
7	01	01	2.03	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.000.000
7	01	01	2.03	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 5.000.000
7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 67.500.000
7	01	01	2.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 20.000.000
7	01	01	2.05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 47.500.000
7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 225.837.000
7	01	01	2.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.400.000
7	01	01	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 62.000.000
7	01	01	2.06	000 5	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	Rp 12.500.000
7	01	01	2.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 660.000

7	01	01	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 143.277.000
7	0 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 235.000.000
7	01	01	2.07	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 30.000.000
7	01	01	2.07	000 5	Pengadaan Mebel	Rp 35.000.000
7	01	01	2.07	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 70.000.000
7	01	01	2.07	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 100.000.000
7	0 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 164.824.000
7	01	01	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Rp 44.304.000
7	01	01	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 120.520.000
7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 96.750.000
7	01	01	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.750.000
7	01	01	2.09	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 25.000.000
7	01	01	2.09	000 8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 5.000.000
7	01	01	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 65.000.000
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 62.610.660
7	0 1	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 6.500.000
7	01	02	2.02	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 6.500.000
7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 56.110.660

7	01	02	2.04	000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 56.110.660
7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 82.500.000
7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 82.500.000
7	01	03	2.01	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 17.500.000
7	01	03	2.01	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 65.000.000
7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 57.600.000
7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 57.600.000
7	01	05	2.01	000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp 24.000.000
7	1	5	2,01	000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 33.600.000
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 231.000.000
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 231.000.000
7	01	06	2.01	000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 62.000.000
7	01	06	2.01	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 10.000.000
7	1	6	2,01	000 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.000.000

					dengan Pembangunan Desa	
7	1	6	2,01	011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 35.000.000
7	01	06	2.01	001 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp 54.500.000
7	01	06	2.01	001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp 6.000.000
7	01	06	2.01	001 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp 58.500.000
					TOTAL	Rp 3.522.821.660

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2025. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Kecamatan Sungai Ambawang secara khusus maka Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang disusun dengan landasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Substansi Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang disusun terukur berdasarkan tata laksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dan Renstra Kecamatan Sungai Ambawang.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Kecamatan Sungai Ambawang, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Kecamatan Sungai Ambawang, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada

Rencana Kerja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Kecamatan Sungai Ambawang pada tahun 2025 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2026. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target dan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebaagian tata ruang dan statistik dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sungai Ambawang ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Ambawang, Oktober 2024

Camat Sungai Ambawang

JURIN, SE
Perata Tk I
NIP. 19760909 200312 1 006